

Penerapan Nilai Anti Korupsi Dilingkungan MI Al-Hidayah Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Khotimatul Amanah¹, Moh. Faizul Mubin², Uswatun Hasanah³, Seftiana⁴

^{1,2,3}Program Studi Aqidah Filsafat Islam, IAINKudus

e-mail: Khotimatulamanah2@gmail.com¹, faizulmubin.20@gmail.com², uswapusypus@gmail.com³, seftiana1001@gmail.com⁴

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan, pengembangan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan mengembangkan keprofesionalan dalam bidang pengajaran, memahami seluk-beluk sekolah dengan segala permasalahannya, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap yang telah dimiliki dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pelaksanaan pengabdian masyarakat di MI AL – HIDAYAH.Prawoto, mahasiswa mengembangkan kompetensi mengajarnya sebagai calon pendidik. Selain itu, memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar dan mengenal segala permasalahan di sekolah yang terkait dengan proses pembelajaran maupun administrasi sekolah, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata di sekolah, serta dapat meningkatkan hubungan kemitraan yang baik antara IAIN Kudus dengan sekolah terkait, yaitu MI AL – HIDAYAH, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Kata kunci: Anti Korupsi, MI Al Hidayah, Siswa

Abstract

This community service activity is intended to provide teaching experience, broaden horizons, training, skill development, independence, responsibility, and the ability to develop professionalism in the field of teaching, understand the ins and outs of school with all its problems, and provide opportunities for students to apply knowledge, skills, and the value of attitudes that have been owned in the learning process. Based on the implementation of community service at MI AL – HIDAYAH.Prawoto, students develop their teaching competence as prospective educators. In addition, it provides opportunities for students to learn and recognize all problems at school related to the learning process and school administration, provides opportunities for students to apply knowledge, knowledge, skills, and attitude values that have been learned in real life at school, and can improve good partnership relationship between IAIN Kudus and related schools, namely MI AL – HIDAYAH, Prawoto Village, Sukolilo District, Pati Regency.

Keywords: Anti-Corruption, MI Al Hidayah, Students

1. PENDAHULUAN

Norma masyarakat terbentuk sebagai hasil dari perubahan pola hidup dan perilaku yang terus menerus dipengaruhi oleh norma sosial baru secara seimbang. Pola hidup lama yang sekarang dianggap tidak relevan akan diganti dengan pola baru, mengikuti kebutuhan masyarakat. Perubahan yang terjadi pada aspek sosial, nilai, dan norma harus diperhatikan karena menyangkut lingkaran penuh budaya dan perilaku masyarakat. Perubahan sosial tersebut dengan sendirinya akan membentuk nilai-nilai kebangsaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai kebiasaan yang tetap, dan dengan demikian perubahan ini sangat terkait dengan tindakan masyarakat. Lebih dari itu, perbuatan atau perilaku buruk masyarakat akan membentuk budaya yang sudah mendarah daging secara konsisten jika tidak diperbaiki. Sebagai salah satu contohnya, korupsi harus segera diberantas karena perkembangannya menyangkut seluruh lapisan masyarakat dan dipraktikkan oleh hampir semua institusi di dunia, termasuk Indonesia (Putra & Linda, 2022).

Beberapa penelitian menemukan korelasi yang signifikan dan kuat antara belanja publik dan hasil pendidikan setelah tata kelola diperhitungkan. Memanfaatkan upaya pemerintah

Uganda untuk mengurangi korupsi sebagai sumber variasi, Björkman (Björkman, 2006) menemukan bahwa bagian yang lebih tinggi dari hibah benar-benar sampai ke sekolah-sekolah di daerah yang kurang korup, dan bahwa siswa di daerah tersebut mendapat nilai standar deviasi 0,4 lebih tinggi di sekolah dasar. ujian keluar tingkat Demikian pula, Rajkumar dan Swaroop (Rajkumar & Swaroop, 2008) menemukan bahwa persentase peningkatan pangsa belanja pendidikan publik terhadap PDB menurunkan angka putus sekolah sebesar 0,7% di negara-negara dengan tata kelola yang baik, tetapi tidak memiliki efek yang terlihat di negara-negara dengan tata kelola yang lemah.

Pada penelitian Daniel Suryadarma (Suryadarma, 2012) Pengeluaran publik yang lebih tinggi ditemukan terkait dengan tingkat pendaftaran yang lebih tinggi hanya di kabupaten yang kurang korup. Oleh karena itu, meskipun meningkatkan belanja publik mungkin merupakan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan pendaftaran sekolah di negara tersebut, hal itu tidaklah cukup. Pemangku kepentingan harus melakukan upaya keras untuk memberantas korupsi di sektor pendidikan agar pengeluaran yang lebih tinggi memberikan efek positif pada partisipasi sekolah. Sebaliknya, belanja publik tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan kualitas sekolah seperti yang ditunjukkan oleh hasil ujian siswa. Ini tidak berarti bahwa pengeluaran publik harus dikurangi; sebaliknya, hasil menunjukkan bahwa hanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor pendidikan tidak akan meningkatkan kualitas sekolah kecuali hal ini disertai dengan kebijakan lain, seperti memperbaiki kurikulum dan merekrut guru yang lebih berkualitas. Beberapa dari kebijakan ini memang membutuhkan lebih banyak dana, tetapi mereka membutuhkan lebih dari sekadar dana agar berhasil. Berdasarkan temuan dalam makalah ini, salah satu respons kebijakan yang perlu dilakukan adalah melakukan kampanye yang lebih kuat melawan korupsi, karena hal ini akan menghasilkan peningkatan pendaftaran sekolah untuk setiap tingkat pengeluaran publik untuk pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan potensi permasalahan yang ada di MI AL – HIDAYAH yang berkaitan dengan Proses kegiatan belajar mengajar ditemukan bahwa belum adanya sosialisasi ataupun pembelajaran langsung di MI AL – HIDAYAH tentang Anti Korupsi yang secara mendetail serta penerapan secara langsung mengenai penanganan Anti Korupsi kepada siswa siswi. Akan tetapi Pemahaman tentang Anti Korupsi yang sederhana sudah diajarkan kepada siswa siswi melalui pembelajaran karakter anak dengan tujuan memberi arahan dan mempraktikkannya. Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan adanya kegiatan pengajaran yang mendetail serta pengarahan bagaimana cara menangani nilai anti korupsi yang biasanya dilakukan dilingkungan sekolah, membahas dan menjelaskan serta menerapkan bahkan mengamalkan tentang Anti Korupsi secara mendalam dan mendetail. langkah-langkah dan penanganan tentang Korupsi yang baik dan benar.

2. METODE

Metode utama dalam pengabdian ini adalah *Service-Learning*. Metode ini bagi mahasiswa, selain memberikan model pembelajaran aktif, yang metodenya tidak hanya kuliah tatap muka di dalam kelas, juga memberikan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Mahasiswa dapat mendukung aktivitas masyarakat dengan membantu menemukan solusi terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, sehingga mahasiswa dapat berkontribusi langsung terhadap masyarakat di sekitarnya dan memahami bagaimana penerapan ilmunya di lapangan. Mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian ini merancang kegiatan yang sasaran utamanya adalah penanaman nilai-nilai anti korupsi untuk para siswa siswi MI AL – HIDAYAH. Materi yang disampaikan yaitu terkait langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan kegiatan Pengabdian masyarakat, serta membahas keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru maupun calon guru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengajaran yang mahasiswa latih adalah keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, keterampilan menyusun skenario pembelajaran, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan mengelola kelas, keterampilan bertanya, dan keterampilan mengevaluasi. Setiap mahasiswa melakukan praktik pengajaran dengan menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Adapun nilai-nilai yang disampaikan antara lain berkaitan dengan Pengenalan anti korupsi, bentuk-bentuk korupsi, tindakan korupsi di sekolah, pencegahan korupsi, dan pembiasaan anti korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau ³*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Samidan, 2011: 11). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Semakin berkembang makna definisi korupsi pun mengalami pengembangan, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Pola korupsi yang terjadi di Indonesia adalah dalam konteks birokrasi. Dalam setiap kasus korupsi di Indonesia, media massa selalu membeberkan nama oknum yang melakukan korupsi dan beberapa koruptor yang terbukti dalam operasi tangan merah oleh KPK. Bahkan, ada pola korupsi yang dilakukan para koruptor dalam segala perbuatannya. Oleh karena itu, pola korupsi di Indonesia tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak dilakukan secara kebetulan (Hamdani et al., 2017). Hal ini lah yang ingin difahamkan kepada para peserta didik.

Berkaitan berkaitan dengan klasifikasi korupsi motifnya banyak, antara lain menyenangkan atasan atau tidak "membocorkan" rekan kerja. Namun, kebanyakan ada keserakahan, dan di negara-negara berkembang sering ada kebutuhan, karena pegawai negeri seringkali terpaksa mencari nafkah dengan upah subsisten. Kadang-kadang kegiatan korup dilakukan untuk menunjukkan patronase, dan menunjukkan bahwa seseorang dapat memberikan untuk keluarga, kroni, kekasih atau teman (Gounev et al., 2012).

Dalam kegiatan pengajaran nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan para mahasiswa ini, anak diharapkan dapat memahami masalah sebab akibat yang kongkrit. Itu sebabnya, mereka dapat diperkenalkan pada suatu tindakan dengan hasil yang baik dan buruk. Berikut adalah alasan (reasoning) mengapa pendidikan anti korupsi perlu diberikan sejak dini terutama kepada anak yang duduk di bangku sekolah dasar, yaitu:

1. Siswa belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang anti korupsi. Untuk itu, mereka perlu dikenalkan dengan nilai-nilai konkret yang diyakini mampu melawan korupsi;
2. Kurangnya teladan dari lingkungan (orang tua, guru, orang dewasa sekitar, dan media). Keteladanan orang-orang terdekat dan sekitarnya akan sangat membantu dalam proses penanaman nilai-nilai atau karakter yang diharapkan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari;
3. Adanya persaingan tidak sehat antar siswa. Upaya menghindari persaingan tidak sehat dalam pergaulan di sekolah dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai sekolah, seperti saling menghargai, saling menghargai, kesederhanaan, dan tidak pamer.

Bahkan bila perlu sekolah dapat memberikan penghargaan kepada siswa yang berperilaku terpuji;

4. Sekolah tidak menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Oleh karena itu, peraturan sekolah harus dibuat bersama antara guru, orang tua, dan siswa, sehingga siswa merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan guru dan orang tua berperan sebagai fasilitator dan pengawas. Jika ada yang melanggar tata tertib sekolah, maka yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya;
5. Pembelajaran di sekolah masih didominasi aspek kognitif. Pembelajaran seperti ini kurang mampu membentuk karakter siswa. Untuk itu perlu dikembangkan pembelajaran afektif yang aplikatif dengan model pembelajaran yang dikuasai oleh guru, sehingga pembelajaran kognitif akan dikawal untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah dasar. Metode dongeng, permainan (games), dan simulasi/sosiodrama dapat diterapkan dalam pembelajaran afektif di sekolah.

Berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran mengenai nilai-nilai korupsi ini, para siswa menunjukkan antusiasnya. Walau hal yang disampaikan adalah nilai-nilai yang dianggap sebagai materi yang berat untuk anak usia SD, namun dengan metode yang menyenangkan, hal tersebut dapat disampaikan dan diterima dengan lebih mudah. Menurut Ki Hajar Dewantara apa yang disebut dengan pendidikan adalah pedoman dalam kehidupan tumbuh kembang anak. Makna pendidikan adalah mengarahkan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Moningka et al., 2019).

Pendidikan antikorupsi melalui pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih sistematis dan mudah diukur yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor menjadi sikap menolak dengan tegas tindakan korupsi, tidak akan pernah terjadi jika kita tidak secara sadar mengembangkan kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwariskan (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang ada. muncul di setiap tahapan perjalanan bangsa.

4. KESIMPULAN

Manfaat yang didapatkan selama melaksanakan kegiatan Magang di MI AL – HIDAYAH, PRAWOTO, SUKOLILO, PATI yaitu tanggapan siswa siswi yang sangat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan magang yang diselenggarakan. Dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini tujuan pendidikan antikorupsi dapat dipahami yaitu untuk menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Björkman, M. (2006). *Does Money Matter for Student Performance? Evidence from a Grant Program in Uganda* (No. 326).
- Gounev, P., Dzhekova, R., & Bezlov, T. (2012). *Anti-corruption measures in EU border control*.
- Hamdani, R., Kumalahadi, & Urumsah, D. (2017). The Classification of Corruption in Indonesia: A Behavioral Perspective. *SHS Web of Conferences*, 34, 10002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173410002>
- Moningka, C., Aliudin, E. R., Biasini, N., & Danis, Y. (2019). Preliminary Study: Understanding Corruption in Children as the Basis of Anti-Corruption Education Program in Elementary School. *Proceedings of the International Conference on Psychology and Communication 2018 (ICPC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icpc-18.2019.21>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). IMPACT OF SOCIAL CHANGE ON SOCIETY FROM THE CRIME OF CORRUPTION. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public spending and outcomes: Does governance matter? *Journal of Development Economics*, 86(1), 96–111. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003>

Suryadarma, D. (2012). How corruption diminishes the effectiveness of public spending on education in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(1), 85–100.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2012.654485>